



KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN SELATAN

# bangga  
melayani  
bangsa



# BULETIN

MINGGU KE-

1

JULI 2025

## KEMENKUM KALSEL NEWS



PENGUATAN & PENATAAN  
KELEMBAGAAN



FASILITASI 9 RANPERKADA  
KOPERASI MERAH PUTIH



HARMONISASI  
RANPERBUP HST

DIVISI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI  
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN  
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



## Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi, Rampungkan Dua Ranperbup Tapin



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar rapat harmonisasi. Kali ini harmonisasi dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Tapin yang mengajukan dua buah Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) untuk dilakukan proses harmonisasi.

Rapat berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel dan dibuka oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto. Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Nizar Al Farisy, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Tapin, rapat dihadiri oleh Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah, Ridhoriyadi Fakhrin beserta jajarannya; Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ahmad Rizali beserta jajarannya; serta tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Dalam sambutannya, Eryck Yulianto yang mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, menegaskan bahwa rapat harmonisasi merupakan tahapan krusial dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ia menekankan pentingnya penyelarasan dan pembulatan konsepsi substansi peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menjamin kualitas regulasi yang dihasilkan.

"Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang untuk menciptakan produk hukum yang efektif dan tidak cacat secara hukum," ungkapnya.

Adapun dua rancangan produk hukum yang diharmonisasikan adalah:

1. Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029, dan
2. Rancangan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, Ridhoriyadi Fakhrin, menjelaskan bahwa penyusunan Ranperbup tentang Standar Harga Satuan TA 2026 bertujuan melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 94 ayat (6) Perda Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2022. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Ranperbup sebagai acuan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ahmad Rizali, mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 2025-2029 dilatarbelakangi oleh potensi tinggi bencana di Kabupaten Tapin, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Dokumen tersebut disusun berdasarkan analisis risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Ia juga merujuk pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memberikan dasar hukum penetapan rencana ini oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Selaku Pimpinan Rapat, Nizar Al Farisy menyampaikan bahwa rapat harmonisasi berlangsung dengan lancar dan produktif.

"Rapat ini menjadi forum untuk saling memfasilitasi proses pembentukan produk hukum yang berkualitas. Kami memberikan sejumlah masukan dan saran yang sifatnya konstruktif untuk ditindaklanjuti oleh pemrakarsa Ranperbup sebagai bagian dari perbaikan," tuturnya.

Rapat harmonisasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam mewujudkan peraturan daerah yang selaras dengan kerangka hukum nasional serta aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

## Pembinaan Apel Pagi: Kepala Bidang Pelayanan KI Sampaikan Arahan kepada Seluruh Pegawai



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menggelar rapat hBanjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan apel pagi rutin pada Senin (30/6) bertempat di halaman kantor. Sebagai pembina apel, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, menyampaikan sejumlah arahan kepada seluruh pegawai yang hadir.

Dalam amanatnya, Riswandi menjelaskan bahwa Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama saat ini sedang melaksanakan kegiatan di Jakarta dalam rangka Audiensi dengan Bapak Sekretaris Jenderal terkait pelaksanaan tugas di Kanwil serta melaporkan progres pembangunan gedung Kanwil Kementerian Hukum yang baru di Kota Banjarbaru.

Menutup amanatnya, Riswandi mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

“Kanwil kita masih berproses dalam upaya meraih predikat WBK. Mari kita bersama-sama memperjuangkan pencapaian tersebut dengan konsistensi dan integritas,” ucapnya.

Apel pagi ini menjadi sarana pembinaan kedisiplinan serta penguatan komitmen kolektif dalam mendukung program prioritas Kementerian Hukum di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.





## Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Persiapan FGD Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Peraturan Daerah



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat persiapan Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Daerah, bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, bersama tim kerja secara virtual.

Rapat ini turut dihadiri perwakilan tim koordinasi untuk Kanwil Kalsel dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yakni Viona Wijaya dan Deasy, serta Bambang dari Biro Hukum. Sri Yunita menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2025.

“Kanwil Kalsel telah menginventarisasi sejumlah peraturan daerah, khususnya yang terkait pengelolaan lahan di Kalimantan Selatan, sebagai bahan pembahasan dalam FGD mendatang,” jelas Sri Yunita.

Tim dari BPHN menyampaikan apresiasi atas progres yang telah dicapai Kanwil Kalsel dalam proses analisis dan evaluasi. Salah satu temuan penting adalah adanya daerah yang memiliki dua peraturan daerah yang mengatur substansi yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

Tim dari BPHN menyampaikan FGD mendatang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Tim Analisis dan Evaluasi sebagai sarana untuk melakukan crosscheck data, mematangkan temuan, sekaligus menyusun rekomendasi penyempurnaan peraturan daerah. Selain itu, melalui FGD ini, Kanwil Kalsel bisa menjangkau pendapat dari para pemangku kepentingan, stakeholder terkait, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan lahan dan kebijakan hukum daerah.

Kegiatan persiapan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan pelaksanaan FGD berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan regulasi daerah yang lebih harmonis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.





## Perkuat Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Bahas Peran Strategis Bersama DPRD HST



Banjarmasin, P3H\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah melalui kontribusi di kegiatan pendalaman bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Senin (30/6), di Best World Kindai Hotel Banjarmasin.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan anggota DPRD, Bupati HST, Sekretaris Daerah, jajaran kepala dinas, bagian hukum, serta staf dari lingkungan Pemerintah Kabupaten HST.

Diskusi dibuka oleh Sekda HST, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjatul Mardhiah. Dalam materinya yang bertajuk "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Peraturan Daerah yang Berkualitas", Bahjatul menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan.

“Kualitas suatu peraturan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antar instansi sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi. Kanwil Kemenkum hadir untuk memastikan agar setiap regulasi yang lahir tidak hanya sah secara formil, tetapi juga tepat guna dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi,” ujar Bahjatul di hadapan para peserta.

Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif yang menunjukkan besarnya perhatian peserta terhadap aspek hukum dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini turut diwarnai dengan arahan dari Bupati HST yang menggarisbawahi pentingnya penyusunan regulasi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Acara kemudian ditutup secara resmi oleh Sekda HST.



## Langkah Strategis Kemenkum Kalsel: Audiensi ke Sekjen Bahas Pembangunan dan Penggunaan BMN



Jakarta, Humas\_Info — Dalam rangka memperkuat sinergi dan memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja strategis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan koordinasi dan audiensi ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Senin, 30/06/2025, di Jakarta.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka dari Kantor Wilayah.

Dalam audiensi yang berlangsung bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Nico Afinta, jajaran Kanwil Kalsel menyampaikan beberapa pokok bahasan penting, antara lain laporan hasil penerimaan kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI di Kalimantan Selatan, progres pembangunan lanjutan gedung baru Kanwil Kementerian Hukum Kalsel di Banjarbaru, serta permohonan petunjuk dan arahan terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN) atas sebagian tanah yang saat ini digunakan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebagai akses jalan.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, rombongan Kanwil Kalsel melanjutkan koordinasi ke Kepala Biro Barang Milik Negara. Pembahasan difokuskan pada percepatan proses tender pembangunan gedung lanjutan Kanwil yang telah masuk tahap pengajuan ke UKPBJ. Selain itu, turut disampaikan penayangan video dokumentasi kondisi bangunan TA 2024 dan visualisasi tanah yang dimanfaatkan oleh Polda Kalsel. Arahan resmi mengenai status BMN tersebut akan disampaikan melalui surat dari Sekretariat Jenderal. Adapun terkait tanah hibah yang direncanakan untuk pembangunan Lembaga Masyarakat, akan diarahkan untuk diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasaran sesuai peruntukan.

Kegiatan koordinasi diakhiri dengan pertemuan bersama Kepala Biro Keuangan, yang membahas percepatan revisi anggaran untuk kelanjutan pembangunan gedung Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.

Melalui rangkaian koordinasi ini, diharapkan seluruh proses pembangunan dan penataan aset Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Kemenkum Gelar Sosialisasi Media Monitoring: Fokus Penguatan Peran Humas di Era Digital



Jakarta, Humas\_Info — Dalam rangka memperkuat peran praktisi humas di era digital, Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Media Monitoring: Pemantauan Media Sosial Kementerian Hukum” pada Selasa, 1 Juli 2025. Acara yang berlangsung secara daring ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun.

Dalam sambutannya, Ronald menegaskan pentingnya pemantauan media sosial sebagai alat strategis untuk mendukung tugas-tugas komunikasi publik. Media monitoring memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat, memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui respons yang proaktif, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons terhadap berbagai pertanyaan atau keluhan yang muncul di media sosial. Tidak hanya itu, pemantauan yang baik juga berperan penting dalam mendeteksi potensi krisis lebih awal, sehingga Kementerian Hukum dapat mengambil langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak negatif.

Kegiatan ini juga memperkenalkan pendekatan baru dalam penilaian kinerja media sosial. Jika sebelumnya lebih berfokus pada kuantitas unggahan, kini penilaian diarahkan pada kualitas keterlibatan publik. Penilaian akan difokuskan pada dua kategori utama, yakni akun teraktif dan akun terpopuler. Keduanya mencerminkan tingkat aktivitas dan daya tarik akun media sosial dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemenkum.



Sistem pemantauan terbaru yang mulai diterapkan per 1 Juli 2025 ini mengandalkan data real time untuk memetakan kondisi aktual media sosial di seluruh satuan kerja. Akun teraktif dihitung berdasarkan jumlah unggahan di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Sementara akun terpopuler diukur dari jumlah interaksi yang diperoleh dalam waktu 24 jam setelah suatu konten diunggah.

Sosialisasi ini disambut antusias oleh peserta dari berbagai satuan kerja, termasuk dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Pengenalan format baru dinilai menjadi langkah positif dalam mendorong penyampaian informasi yang lebih komunikatif dan berdampak.

“Dengan adanya panduan yang lebih terarah seperti ini, kami bisa lebih fokus dalam menyampaikan konten yang tidak hanya aktif secara jumlah, tapi juga bermakna bagi masyarakat,” ungkap salah satu peserta dari Kemenkum Kalsel.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran kehumasan di lingkungan Kemenkum semakin strategis dalam membangun citra kelembagaan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap dinamika publik.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-79 di Polda Kalimantan Selatan



Banjarbaru, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Upacara dan Syukuran Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Selasa (01/07). Tahun ini, Hari Bhayangkara mengusung tema “Polri untuk Masyarakat” yang menegaskan peran Polri dalam pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa.

Kemenkum Kalsel diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi yang mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah, Meidy Firmansyah. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi, para kepala daerah, serta jajaran pejabat pemerintahan lainnya.

Suasana nasionalisme dan solidaritas mewarnai seluruh rangkaian kegiatan yang diawali upacara peringatan dan dilanjutkan dengan acara syukuran. Momentum ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga, menjalin komunikasi, dan meningkatkan koordinasi dalam mendukung tugas-tugas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan bahwa partisipasi dalam peringatan Hari Bhayangkara merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Hukum untuk terus membangun kerja sama lintas sektoral, khususnya dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia sebagai mitra strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



## Empat Pelaksana Kemenkum Kalsel Tingkatkan Kapasitas dan Profesionalisme, Ikuti Pelatihan Public Speaking Badiklat Hukum Jawa Tengah



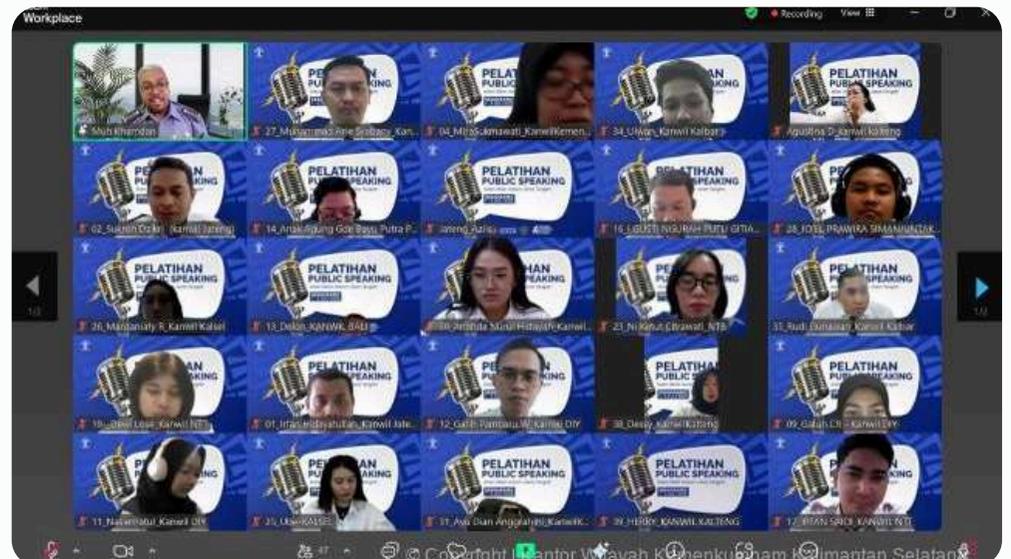
Banjarmasin, Humas\_Info — Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Public Speaking Tahun Anggaran 2025 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pegawai Kementerian Hukum dari 10 Kantor Wilayah di wilayah kerja Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Selasa (01/07/2025). Kegiatan tersebut turut diikuti oleh 4 orang pelaksana perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel).

Pelatihan yang berlangsung mulai 1 hingga 3 Juli 2025 ini diikuti oleh 40 peserta terpilih, yang terdiri dari para analis hukum, penyuluh, pengelola data, serta pejabat fungsional lainnya dari Kanwil Kemenkum di Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, dengan agenda materi antara lain: Penguatan Nilai-Nilai Pancasila, Pengenalan Komunikasi Umum, Teknik Dasar Public Speaking, Personal Branding untuk PNS, serta Praktek dan Evaluasi

Pihak penyelenggara, dalam hal ini Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, menekankan pentingnya integritas dan pelayanan tanpa pungutan biaya seiring dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah disandang. Pelaporan atas dugaan pelanggaran integritas tetap difasilitasi dan dilindungi.

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi publik para pegawai Kementerian Hukum, sejalan dengan tuntutan profesionalisme dan pelayanan prima kepada masyarakat.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong Perlindungan Komoditas Pertanian Banjar Lewat Indikasi Geografis



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Banjar, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam mendorong perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual lokal. Melalui kegiatan koordinasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Kanwil Kemenkum Kalsel melakukan inventarisasi tahap awal terhadap potensi Indikasi Geografis (IG) di sektor pertanian, pada Selasa (01/07/2025).

Bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, kegiatan ini melibatkan tim dari Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama jajaran Helpdesk KI dan dihadiri sejumlah pejabat Distan Banjar, seperti Kasi Pengembangan Sarana Peternakan Lily Marlina, Kasi SDG Ied Eka Norbinsah, Plt. Kasubag Umpeg Marlina, dan Kasi Kelembagaan Petani Dwi Retnani.

Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi komoditas pertanian yang memiliki karakteristik khas dan berpotensi mendapatkan perlindungan hukum melalui skema Indikasi Geografis. Dalam diskusi tersebut, Tim KI Kanwil memberikan arahan teknis terkait pemetaan potensi IG, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pariwisata dan Bapperida dalam penyusunan data dukung dan dokumen deskripsi produk.

Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan beberapa komoditas unggulan yang berpotensi didaftarkan sebagai IG, seperti Kopi Aranio, Beras Hitam Keramat Paramasan, Kopi Robusta Pengaron, dan Melati Batuah. Komoditas-komoditas ini dinilai memiliki keunikan khas wilayah dan nilai jual tinggi jika mendapat pengakuan hukum melalui IG.

“Melalui perlindungan IG, produk lokal tidak hanya memperoleh legalitas dan daya saing di pasar nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi pintu peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan identitas daerah,” ujar Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam mengangkat potensi kekayaan intelektual daerah dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal.



## Kemenkum Kalsel Dorong Kabupaten Banjar Daftarkan Kekayaan Intelektual Komunal



Banjar, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar, Selasa (1/7), guna mendorong percepatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, ini diikuti oleh tim JFT/JFU dan Helpdesk KI dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Pihak Disbudporapar menyambut baik kehadiran tim, yang terdiri dari Kepala Bidang Kebudayaan, Kasie Sejarah dan Nilai Tradisional, Kasie Pembina Kawasan dan Pelaku Pariwisata, serta perwakilan dari Bidang Destinasi.

Dalam pertemuan tersebut, tim Kanwil memaparkan pentingnya perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, dan Sumber Daya Genetik yang dimiliki Kabupaten Banjar. Salah satu urgensi pendaftaran KIK adalah untuk menghindari diklaimnya kekayaan budaya oleh wilayah lain. Hal ini terbukti dari adanya salah satu makanan khas Banjar yang telah lebih dulu didaftarkan pihak lain.



“Kabupaten Banjar punya kekayaan budaya luar biasa, mulai dari makanan khas hingga kerajinan seperti Air Guci. Sangat disayangkan kalau potensi ini tidak segera didaftarkan dan justru diklaim wilayah lain,” ujar Riswandi.

Ia juga menegaskan pentingnya kesiapan data dukung sebagai langkah awal pendaftaran KIK.

“Kami sudah sampaikan syarat-syaratnya, mulai dari formulir, deskripsi, dokumentasi proses, hingga surat pernyataan. Harapannya, Dinas dapat segera melengkapi agar pendaftaran bisa diproses,” tambahnya.

Tim Kekayaan Intelektual juga mendorong agar selain potensi kuliner dan kerajinan, hasil ciptaan masyarakat Banjar seperti lagu, musik, dan karya seni lainnya turut didaftarkan sebagai Hak Cipta melalui fasilitasi Disbudporapar.

Disbudporapar menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjuti arahan dan melengkapi persyaratan pendaftaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya lokal sekaligus meningkatkan jumlah pendaftaran KIK dari wilayah Kalimantan Selatan.



## Kemenkum Kalsel Fasilitasi 9 Daerah Bahas Ranperkada Koperasi Merah Putih



Banjarmasin, Humas\_Info — Dalam upaya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi secara serentak terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada), Rabu (2/7/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah. Rapat diikuti oleh jajaran perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel, para Kepala Bagian Hukum dari 9 Kabupaten/Kota, serta perangkat daerah yang membidangi koperasi.

Dalam sambutannya, Anton menyampaikan bahwa harmonisasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat gerakan koperasi melalui pembentukan Koperasi Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Seluruh Ranperkada ini harus segera diselesaikan. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian desa, mendukung swasembada pangan, dan pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Anton.



Pembahasan harmonisasi dilakukan secara bergiliran dimulai dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga Kota Banjarbaru, membahas aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun dilakukan secara daring, proses harmonisasi berjalan lancar dan kondusif. Anton menyampaikan bahwa seluruh masukan dan koreksi akan dituangkan secara tertulis untuk memudahkan penyempurnaan masing-masing Ranperkada.

Adapun 4 kabupaten/kota lainnya, yakni Kabupaten Balangan, Tapin, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Banjar, telah lebih dulu menyelesaikan proses harmonisasi Ranperkada-nya.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Meidy Firmansyah, menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dan menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus mengawal penyusunan regulasi yang mendorong pembangunan dari desa.

## **Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Rakor Kesiapan KDMP/KKMP sebagai Langkah Strategis Percepatan Program Pemerintah**



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut serta dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Mockup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) Wilayah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Rabu, (02/07) di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi ini dibuka oleh Kepala Dinas, Drs. Gusti Yanuar Noor Rifai yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi serta jaminan keberlanjutannya sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat.

Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Bapak Radian Bagiyono. Dalam arahannya, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan agenda utama yang sebelumnya dijadwalkan pada 12 Juli akan diundur menjadi 19 Juli 2025, dan seluruh pihak diminta mengaktifkan kegiatan sejak dua hari sebelum pelaksanaan. Adapun kegiatan pada tanggal 19 Juli tersebut rencananya akan dilakukan secara live streaming dan diharapkan dapat dihadiri langsung oleh seluruh pejabat terkait sebagai bentuk dukungan bersama.

Dalam pembahasan teknis, dijelaskan bahwa terdapat dua tahapan penting dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu kesiapan mockup koperasi dan upaya menjamin keberlanjutan koperasi setelah dibentuk. Dukungan pembiayaan awal koperasi direncanakan melalui LPDB, sedangkan sistem koperasi diarahkan untuk terintegrasi secara digital dengan mencontoh sistem milik Kominfo. Sementara itu, pendampingan hukum akan disediakan oleh notaris, dan pelatihan untuk pengurus koperasi akan didanai melalui APBN maupun Dana Desa.

Koperasi yang dapat mengakses pembiayaan dari bank seperti BRI harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki akta pendirian koperasi, NIK, NPWP, kegiatan usaha riil seperti layanan klinik atau penjualan pupuk, serta pengurus yang profesional dan telah mengikuti pelatihan dari Kemenkop. Dinas Koperasi Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai percontohan koperasi LPDB, sementara Dinas Koperasi Kota Banjarmasin telah menyiapkan tiga mockup koperasi meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek jaminan.

Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan realisasi program prioritas pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan.

## Kemenkum Kalimantan Selatan Laksanakan Diskusi Penguatan dan Penataan Kelembagaan

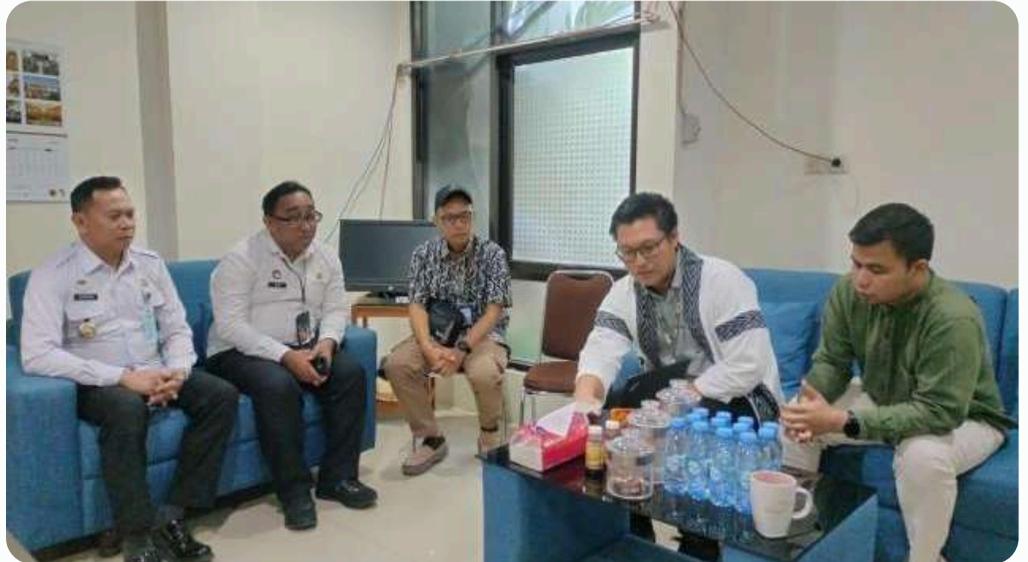


Banjarmasin, Humas\_Info — Rabu (02/07/2025), Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menyelenggarakan Kegiatan Penguatan dan Penataan Kelembagaan. Kegiatan ini merupakan respons atas diberlakukannya sejumlah regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 yang mengatur organisasi dan tata kerja kantor wilayah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mereview dan memperdalam implementasi penyederhanaan struktur organisasi yang telah berjalan selama kurun waktu setengah tahun, serta mengidentifikasi efektivitas mekanisme kerja dan sistem koordinasi antar unit di lingkungan kantor wilayah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menyusun mekanisme koordinasi yang menjelaskan hubungan kerja antara unit internal, Unit Pelaksana Teknis (UPT), hingga Eselon I di tingkat pusat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan sesi diskusi bersama seluruh unit organisasi, termasuk Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan, serta Bagian Tata Usaha dan Umum. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama pejabat manajerial, fungsional, dan pelaksana, dengan dukungan langsung dari Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Hukum.

## Kemenkum Kalsel dan Rumah BUMN Banjarmasin Siapkan Kolaborasi Edukasi HKI untuk UMKM



Banjarmasin, Humas\_Info — Rabu (02/07/2025), Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan dan mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menjalin koordinasi strategis dengan Rumah BUMN Banjarmasin.

Rapat koordinasi ini digelar di Aula Kanwil Kemenkum Kalsel membahas program kolaborasi edukasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya dalam penguatan kapasitas hukum bagi UMKM.

“Kolaborasi ini tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap layanan hukum, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mendorong legalitas dan perlindungan karya pelaku UMKM melalui HKI,” ujar Riswandi.

Dalam rapat tersebut, kedua pihak merancang agenda kerja sama ke depan berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi yang akan difokuskan pada aspek pendaftaran serta perlindungan kekayaan intelektual. Tujuannya adalah agar semakin banyak UMKM di Kalimantan Selatan yang memahami pentingnya legalitas usaha dan hak kekayaan intelektual, sekaligus membentuk sistem rujukan layanan hukum antara Kementerian Hukum dan Rumah BUMN.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model kerja sama yang berdampak nyata dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis hukum dan inovasi di daerah.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Program Pengembangan Inovasi Desa Lewat Perlindungan KI



Banjarbaru, KI\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menunjukkan komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan desa melalui pengembangan inovasi. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Percepatan Pembangunan Desa Melalui Pengembangan Inovasi Desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu, (02/07) di Aula Desa Mandiri Lt. 2, Banjarbaru.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan staf dari instansi pemerintah, lembaga terkait, serta perwakilan desa yang terlibat dalam program inovasi. Kegiatan bertujuan untuk mendorong pembangunan desa berbasis inovasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Setiap desa peserta diminta mengajukan inovasi unggulan yang telah dikembangkan untuk dijadikan percontohan seperti inovasi dari Desa Karang Indah mencakup alat jemuran baju otomatis, sistem deteksi bencana terintegrasi, sistem hidroponik terintegrasi, abon lele, dan kerajinan dari tutup botol. Sementara itu, Kelurahan Sungai Lulut mengusulkan inovasi di bidang pertanian dan perkebunan, seperti pupuk organik cair (POC) dan budidaya keong mas (*Pomacea canaliculata*) yang dikenal dengan nama “PAKEMAS”.

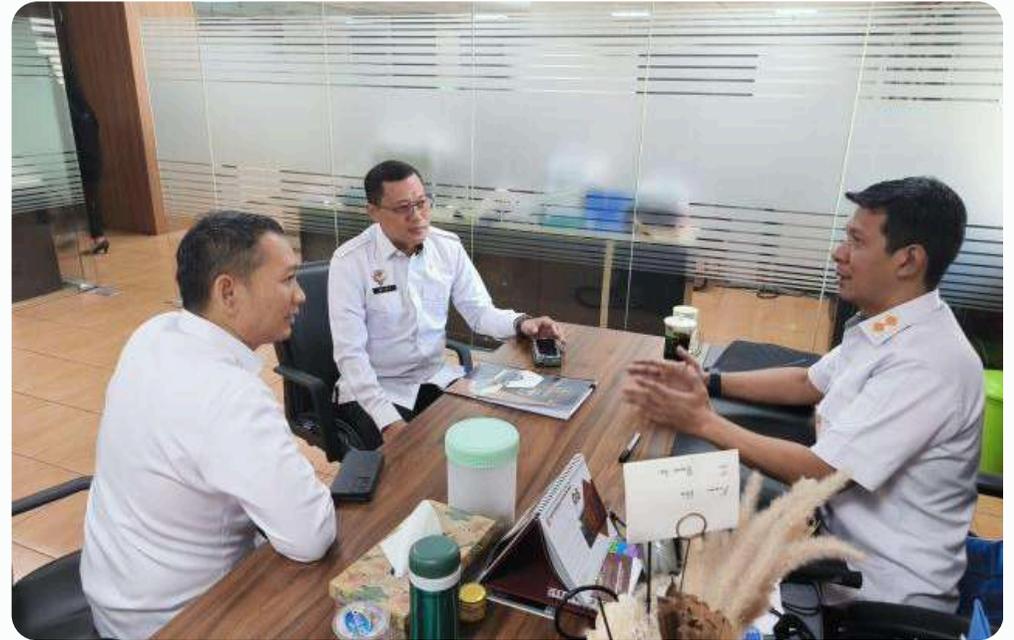


Perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel, M. Aji Rifani, dalam paparannya menjelaskan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap karya dan inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Ia memaparkan jenis-jenis KI seperti paten, merek, dan desain industri yang berfungsi melindungi karya inovatif dari risiko pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

“Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen mendukung penuh inovasi desa, termasuk produk-produk UMKM, melalui fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual agar setiap karya memperoleh perlindungan hukum dan nilai tambah secara ekonomi,” ujar Aji Rifani.

Melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat desa, program pengembangan inovasi desa diharapkan mampu mendorong terciptanya desa yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

## Mantapkan Implementasi ABT DIPA DJKI, Kemenkum Kalsel Gelar Koordinasi Strategis Bersama Biro Perencanaan



Banjarmasin, Humas\_Info — Rabu (02/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam penguatan program strategis bidang kekayaan intelektual. Sebagai bentuk tindak lanjut dari alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2025, Kanwil Kemenkum Kalsel menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Strategis Tindak Lanjut ABT DIPA DJKI yang digelar pada 2–3 Juli 2025 di Banjarmasin.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran tambahan tersebut berjalan optimal, akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dalam bidang perlindungan kekayaan intelektual. Fokus koordinasi diarahkan pada optimalisasi program pelayanan, promosi, dan edukasi HKI di Kalimantan Selatan.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menegaskan pentingnya sinergi antara unit pelaksana teknis dengan Biro Perencanaan dalam menyusun langkah-langkah pelaksanaan program secara terukur dan tepat sasaran.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung perlindungan hukum atas kekayaan intelektual serta pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Diharapkan koordinasi ini memperkuat sinergi antar unit kerja dan mendorong implementasi program yang terarah dan berdampak luas,” ujar Meidy.

Sebagaimana diketahui, kekayaan intelektual menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran secara efektif menjadi kunci untuk mendukung pelaksanaan program yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, kreator, dan inovator di wilayah Kalimantan Selatan.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Kalsel juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara transparan, akuntabel, dan mendukung pencapaian target strategis DJKI. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang responsif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan intelektual.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (03/07). Kegiatan ini diikuti Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN, Yansurullah, Ketua Tim Kerja BSK, Eldy Prasetya Setiawan, Ketua Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Laporan, Ahmad Zubaidi, beserta masing-masing tim kerja.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran BSK yang akuntabel dan transparan. Evaluasi dan monitoring difokuskan pada capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Kantor Wilayah yang melaksanakan program dan kegiatan anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah, khususnya untuk periode Triwulan II Tahun 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian dan Lembaga. Hal tersebut berdampak langsung pada penilaian indikator kinerja dalam IKPA. Selain itu, Dwi Harnanto juga menekankan bahwa pengembangan aplikasi SAKTI turut mempengaruhi layanan keuangan pada Februari dan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran di seluruh satuan kerja.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, disarankan beberapa langkah strategis, antara lain percepatan realisasi belanja serta pengoptimalan penyerapan anggaran, pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat juga menjadi hal penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, diharapkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan Strategi Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah semakin meningkat, sehingga mendukung tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Harmonisasi Ranperbup Tapin tentang HSPK dan ASB Tahun Anggaran 2026



Banjarmasin, Humas\_Info — Kamis (03/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum kembali melaksanakan tugas fasilitasi produk hukum daerah. Kegiatan ini difokuskan pada Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tapin mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun Anggaran 2026.

Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran perancang peraturan Kanwil Kemenkum Kalsel, Kepala Bidang Penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin Joni Ansyari beserta tim, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin, Achmad dan jajarannya.

Dalam sambutannya, kedua perwakilan dari Kabupaten Tapin menyampaikan bahwa Ranperbup ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA dan DPA) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rapat harmonisasi dimulai dengan pembahasan mendalam mengenai substansi peraturan, termasuk pemutakhiran dasar hukum yang digunakan. Masukan substansi dan teknis redaksional juga disampaikan oleh para perancang peraturan untuk penyempurnaan naskah akademik dan batang tubuh Ranperbup.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan kualitas regulasi daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip good governance.

## Pentingnya Ranperbup HST Diharmonisasi Kemenkum Kalsel, Ini yang Dibahas



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat di Balai Pertemuan Garuda, Banjarmasin, pada Kamis (03/07/2025). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Jalannya rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Eryck Yulianto, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja).

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hadir Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Damanhuri Barabai, dr. Nanda Sujud Andi Yudha Utama, Kabag Hukum Setda HST, Taufik Rahman, serta Inspektur HST, Ainur Rafiq, bersama jajaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika, RSUD H. Damanhuri Barabai, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Inspektorat, dan Bagian Hukum.

Dalam pengantarnya, Eryck Yulianto menegaskan pentingnya kegiatan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan langkah penting untuk memastikan regulasi yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi ini adalah langkah penting agar setiap produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tepat secara substansi. Kami memastikan bahwa regulasi yang dibentuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Adapun rancangan produk hukum yang dibahas meliputi Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024. Rancangan ini mengatur ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD H. Damanhuri Barabai. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan rumah sakit dalam merekrut tenaga non ASN yang relevan dan profesional sesuai dinamika pelayanan.

Selain itu, turut dibahas Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Murakata. Regulasi ini disusun sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2012, dengan tujuan mengatur tata kelola lembaga penyiaran publik lokal agar berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Rapat harmonisasi ini menjadi bagian penting dari upaya bersama antara pemerintah daerah dan Kemenkum Kalsel untuk memastikan setiap produk hukum yang disusun dapat berjalan selaras dengan prinsip hukum nasional dan menjawab kebutuhan daerah secara nyata.



## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Lakukan Koordinasi Re-Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI



Banjarmasin, KI\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pemenuhan data dukung Target Kinerja B07 terkait Re-Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (03/07) dengan mengunjungi Duta Mall Banjarmasin sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di wilayah Kalimantan Selatan.

Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, didampingi Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Rombongan disambut oleh Pratiwi Dian selaku Divisi Legal Duta Mall dan General Manager Duta Mall, Dody.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pelayanan KI menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi, khususnya untuk memastikan apakah tenant di Duta Mall telah mendaftarkan merek usahanya. Menanggapi hal itu, pihak manajemen mall menjelaskan bahwa pengecekan pendaftaran merek tenant belum dilakukan secara mendetail per unit, namun manajemen secara rutin mengingatkan seluruh tenant agar segera melakukan pendaftaran merek.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menyarankan agar proses pendaftaran merek tenant lebih digiatkan. Riswandi menyampaikan, perlindungan merek tidak hanya penting bagi tenant, tetapi juga memberikan manfaat strategis bagi pengelola pusat perbelanjaan karena berpotensi memperoleh sertifikasi “Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan siap mendampingi dalam dua aspek, yaitu fasilitasi proses pendaftaran merek tenant, serta bantuan apabila terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual, khususnya terhadap merek,” ujar Riswandi.

Dody selaku General Manager Duta Mall menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam meningkatkan kesadaran dan jumlah permohonan pendaftaran merek tenant. Ia berharap kerja sama ini dapat berjalan berkesinambungan guna mendukung perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan pusat perbelanjaan.

Dalam rangkaian kunjungan, Tim Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan turut mendatangi beberapa tenant lokal dan pelaku UKM di antaranya Ayu Lestari, VZ, dan Camela. Tim menyampaikan rencana pendampingan terkait pendaftaran merek serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual seperti peredaran produk tiruan atau barang KW.

Kegiatan koordinasi ini menjadi salah satu wujud komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam memberikan edukasi dan pendampingan Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan, terutama kepada pelaku usaha dan pengelola pusat perbelanjaan di wilayah Kalimantan Selatan.

## Kepala Divisi PPPH Hadiri Peresmian Kantor Kejati di Banjarbaru, Tegaskan Sinergi Penegakan Hukum



Banjarbaru, Humas\_Info – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, menghadiri langsung peresmian gedung baru Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, Kamis (3/7). Kehadirannya mewakili Plt. Kepala Kantor Wilayah dalam rangka memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum di Banua.

Acara peresmian yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menjadi momentum penting dalam konsolidasi kelembagaan hukum di Kalimantan Selatan, menyusul ditetapkannya Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai kedudukan Kejaksaan Tinggi.

Dalam sambutannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa perpindahan Kejati dari Banjarmasin ke Banjarbaru bukan sekadar pergeseran lokasi fisik, melainkan simbol dari peningkatan kualitas pelayanan hukum dan komitmen terhadap penegakan hukum yang profesional, bersih, dan berkeadilan. Ia juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang harus dilakukan secara sinergis antar seluruh instansi hukum dan pemerintah daerah.

Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana, menyatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret Kemenkum Kalsel terhadap upaya Kejaksaan membangun integritas hukum yang kuat di daerah.

“Kami terus mendorong kolaborasi lintas kelembagaan demi memperkuat sistem hukum yang adil, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya usai kegiatan.

Acara juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhiddin, Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Kejati Kalsel Rina Virawati, para pimpinan Forkopimda se-Kalimantan Selatan, serta para bupati/wali kota dan pimpinan instansi vertikal di wilayah Kalsel.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai simbol peresmian. Kantor baru Kejati Kalsel diharapkan dapat memperkuat kinerja lembaga hukum serta memberi dampak positif dalam pelayanan kepada masyarakat Banua.

## Resmi Dibuka Wakil Menteri Hukum! Kanwil Kalsel Hadiri Pembukaan Rangkaian Kegiatan Hari Pengayoman 2025

Banjarmasin, Humas\_Info – Seluruh Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut mengikuti kegiatan Pembukaan Rangkaian Peringatan Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025 yang digelar pada Jumat, (04/07), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan secara virtual.

Peringatan tahun ini mengusung tema “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”. Kegiatan pembukaan turut dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Persatuan Olahraga Pengayoman (POP) tingkat pusat dan kantor wilayah masa bakti 2025–2026. Pengukuhan ini diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan olahraga yang menjunjung tinggi nilai sportivitas serta mempererat kebersamaan antarpegawai.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pengayoman ke-80 dilaksanakan untuk memupuk rasa bangga dan cinta terhadap institusi, sekaligus memperkuat soliditas dan solidaritas di lingkungan Kementerian Hukum.

”Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai 4 Juli hingga 19 Agustus 2025, dengan berbagai agenda seperti pertandingan olahraga, bakti sosial, dan tasyakuran pada puncak peringatan” jelas Nico Afinta

Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, yang membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menciptakan nilai sportivitas dan menjalin silaturahmi antarpegawai. Beliau mengajak seluruh jajaran Kementerian Hukum untuk senantiasa bahu membahu, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam membangun lembaga yang dicintai bersama.



## Wakili Kemenkum Kalsel, Muhammad Arie Sya'bany Raih Peserta Terbaik 1 Pelatihan Public Speaking Badiklat Hukum Jawa Tengah



Banjarmasin, Humas\_Info — Komitmen untuk menghadirkan IBanjarmasin, Humas\_Info — Jumat (04/07/2025), Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Public Speaking Tahun Anggaran 2025 dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para pegawai Kementerian Hukum dari 10 Kantor Wilayah, Selasa (01/07/2025). Kegiatan ini diikuti oleh empat orang pelaksana perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel).

Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Juli 2025 ini diikuti oleh 40 peserta terpilih, yang terdiri dari analis hukum, penyuluh, pengelola data, serta pejabat fungsional lainnya dari Kanwil Kemenkum di wilayah kerja Badiklat Hukum Jawa Tengah: Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting, dengan agenda materi antara lain: Penguatan Nilai-Nilai Pancasila, Pengenalan Komunikasi Umum, Teknik Dasar Public Speaking, Personal Branding untuk PNS, serta Praktek dan Evaluasi.

Pihak penyelenggara menekankan pentingnya integritas dan pelayanan bebas pungutan, sesuai dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih. Pelaporan atas dugaan pelanggaran integritas tetap difasilitasi dan dilindungi.

Kabar membanggakan datang dari Kanwil Kalimantan Selatan, di mana salah satu perwakilan peserta, Muhammad Arie Sya'bany, dinobatkan sebagai Peserta Terbaik 1 dalam pelatihan tersebut. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan kompetensi pegawai Kemenkum Kalsel dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik serta mendukung profesionalisme ASN.

"Terima kasih atas pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Badiklat Hukum Jawa Tengah dan APDC Indonesia, melalui pelatihan ini saya dapat belajar lebih banyak bagaimana menyampaikan pesan dan informasi kepada publik dengan cara yang baik. Karena public speaking tidak hanya mengenai apa yang disampaikan namun bagaimana kita dapat terhubung dengan audiens dengan menginspirasi dan menciptakan dampak," ungkap Arie.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal berharga bagi para peserta dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memperkuat citra positif institusi Kementerian Hukum di mata publik.

## Tumbuhkan Nilai Sportivitas, Kemenkum Selenggarakan Kompetisi Olahraga



Depok – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej membuka rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-80 Kementerian Hukum (Kemenkum) Tahun 2025. Pembukaan Hari Pengayoman Ke-80 ini dimulai dengan berbagai kegiatan kompetisi olahraga yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Kemenkum.

Dalam sambutannya, Wamenkum menyampaikan, bahwa di dalam olahraga terdapat nilai sportivitas. Dan di dalam nilai sportivitas ada semangat untuk bekerja secara profesional.

“Rangkaian Hari Pengayoman ke-80 ini di mulai dengan olahraga, untuk menciptakan nilai sportivitas, karena dalam menjaga nilai sportivitas itu ada semangat untuk bekerja secara profesional,” ujar Wamenkum di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, pada Jumat (04/07/2025).

Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80 yaitu “80 Tahun Pengayoman: Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, diharapkan seluruh pegawai bisa bahu-membahu, bekerja sama dan berkolaborasi untuk memajukan Kemenkum.

“Sesuai dengan tema Hari Pengayoman Ke-80, kita diharapkan bisa bahu membahu, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan kementerian yang kita cintai bersama ini menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.



Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, serta menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum.

“Tujuan rangkaian Hari Pengayoman Ke-80 ini adalah untuk meningkatkan kepedulian sosial serta kontribusi nyata Kemenkum kepada masyarakat, yang terakhir menampilkan capaian inovasi dan peran strategis Kemenkum dalam pembangunan hukum,” ucap Nico.

Pelaksanaan Hari Pengayoman Ke-80 dimulai pada tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan kegiatan puncak pada tanggal 19 Agustus 2025. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi upacara pembukaan, bakti sosial, pelayanan publik, olahraga dan upacara puncak hari pengayoman.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, menyambut baik penyelenggaraan rangkaian kegiatan Hari Pengayoman Ke-80 yang diawali dengan kompetisi olahraga. Menurutnya, nilai sportivitas yang dikedepankan dalam kegiatan ini tidak hanya membentuk semangat kebersamaan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan Kemenkum.

“Olahraga mengajarkan kita untuk menjunjung kejujuran, disiplin, dan kerja sama—nilai-nilai yang juga menjadi fondasi dalam menjalankan tugas pengayoman dan pelayanan publik,” ujar Meidy.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar Strategi Merek Kolektif untuk Produk Unggulan Daerah



Banjarmasin, Humas\_Info — Jumat (04/07/2025), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Webinar Strategi Pemanfaatan Merek Kolektif untuk Penguatan Produk Unggulan Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan dukungan bagi pengembangan produk-produk unggulan daerah yang memiliki daya saing serta perlindungan hukum terhadap identitas kolektif komunitas di seluruh Indonesia.

Webinar bertema Optimalisasi Pendaftaran Merek Kolektif Produk Unggulan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek kolektif sebagai bagian dari strategi penguatan produk lokal.

Partisipasi aktif dalam webinar ini diharapkan dapat mendorong semakin banyaknya produk unggulan daerah di Kalimantan Selatan yang terlindungi secara hukum melalui pendaftaran merek kolektif.





**KEMENTERIAN HUKUM  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkassel](#)



[@kemenkumkassel](#)



[kassel.kemenkum.go.id](#)